



## Implementasi Pedoman Umum Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Sigi

Afdal

Universitas Tadulako

**Muh. Irfan Mufti**

Universitas Tadulako

**Hasan Muhamad**

Universitas Tadulako

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.Km.9, Tondo, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, 94148

Korespondensi penulis: [afdalrandalembahars@gmail.com](mailto:afdalrandalembahars@gmail.com)

**Abstrak.** *The aim of this research is to clearly understand the implementation of general guidelines for the formation of disaster resilient villages/subdistricts in Sigi Regency. The results of the research show that the implementation of general guidelines for the formation of disaster resilient villages/subdistricts in Sigi Regency. It is quite good, it can be seen from the fulfillment of aspects of policy standards and targets, communication between organizations that is quite good and social, political and economic conditions that support it well. Furthermore, the implementing resources are still not sufficiently well met in carrying out the disaster resilient village program both in quantity and quality, the pattern of division of work has not been implemented optimally and the attitude of the implementers in carrying out their duties and responsibilities has not been implemented well, only a few individuals are active in building collaborative relationships with external parties in a collaborative manner, all departments should contribute actively in accordance with their main duties and functions in realizing the formation of disaster resilient villages in the Sigi Regency area in accordance with the mandate of the law.*

**Keywords:** Policy Implementation, Disaster Resilient Village.

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas implementasi pedoman umum pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana di Kabupaten Sigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pedoman umum pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana di Kabupaten Sigi. Sudah cukup baik, dapat dilihat dari terpenuhinya aspek standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi yang sudah cukup baik dan kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mendukung dengan baik. Selanjutnya sumberdaya pelaksana masih belum cukup terpenuhi dengan baik dalam menjalankan program desa tangguh bencana baik secara kuantitas maupun kualitas, pola pembagian kerja yang belum terlaksana dengan maksimal dan sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab belum terlaksana dengan baik, hanya beberapa individu saja yang aktif dalam membangun hubungan kerjasama dengan pihak luar secara kolaboratif, seharusnya semua bagian berkontribusi aktif sesuai dengan tupoksinya dalam mewujudkan pembentukan desa tangguh bencana di wilayah Kabupaten Sigi sesuai dengan amanat undang-undang.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Desa Tangguh Bencana

### PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana menerangkan, bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang sangat

memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Bencana tersebut dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Oleh karena itu diperlukan upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam rangka meminimalisasi dampak bencana.

Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyusun sistem dan strategi melalui kebijakan agar upaya PRB berbasis pada komunitas. Strategi tersebut, membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) yang ditulis dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Melalui Peraturan Kepala BNPB, dimaksud dengan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.

Adapun bentuk kapasitas yang dimiliki Desa Tangguh Bencana akan terwujud melalui perencanaan pembangunan yang didalamnya mengandung berbagai upaya pencegahan dari potensi bencana, kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana pasca bencana.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, tersebut terdapat tujuan dari pembentukan Destana yaitu, sebagai berikut: (1) Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak merugikan bencana; (2) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana; (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB; (4) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberi dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB; (5) Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli. Selanjutnya komponen-komponen Destana antara lain: (1) Legislasi; (2) Perencanaan; (3) Kelembagaan; (4) Pendanaan; (5) Pengembangan kapasitas; dan (6) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB).

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana Van Metter dan Van Horn dalam Budi Winarno, (2007:144), Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan, bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan, bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu: (1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik organisasi pelaksana; (4) Sikap para pelaksana; (5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan; (6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Kabupaten Sigi terdiri dari 16 kecamatan dan 177 desa dengan luas wilayah 5.196,02 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 239.421 jiwa dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi 2017-2019. Letak geografis berada pada 1° 24' 0" S, 120° 0' 0" E. Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai wilayahnya yang terletak di Lembah Palu yang merupakan jalur *Sesar Palu Koro* dan yang lainnya terletak di wilayah pegunungan yang rawan terhadap longsor dan banjir serta memiliki potensi ancaman bencana yang begitu kompleks. Berdasarkan laporan tersebut, bahwa risiko bencana di Kabupaten Sigi memiliki 8 ancaman risiko yang relatif tinggi antara lain gempabumi, banjir, longsor, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan. Salah satu bencana yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 adalah bencana gempa bumi dan likuefaksi dengan jumlah korban jiwa sebanyak 453 jiwa meninggal, luka-luka 807 jiwa, rumah rusak berat 13.144 unit, rusak sedang 6.480 unit dan rusak ringan 10.612 unit. (Sumber:Laporan Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi dan Likuefaksi Kabupaten Sigi, 9 September 2019).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan pembentukan desa tangguh bencana, Pemerintah Kabupaten Sigi masih dinilai kurang melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat di desa-desa yang telah menjadi sasaran pembentukan desa tangguh bencana, hal ini dapat dilihat dari jumlah korban jiwa dan kerusakan yang cukup besar akibat bencana pada saat terjadi bencana banjir bandang, gempa bumi dan liquifaksi di beberapa desa yang telah dijadikan sasaran pembentukan desa tangguh bencana. Selain itu, yang menjadi salahsatu perhatian di Kabupaten Sigi yaitu koordinasi dan komunikasi yang kurang baik antar pihak dan ego sektoral yang cukup tinggi dalam upaya penanggulangan bencana, serta sumberdaya manusia sebagai pelaksana program desa tangguh bencana masih kurang mempuni, hal ini dapat dilihat, bahwa sampai saat ini desa yang telah dijadikan sasaran pembentukan desa tangguh bencana masih berada pada level pratama hingga madya sesuai dengan hasil Penilaian Ketangguhan Desa.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah”.

### **KAJIAN TEORI**

Kebijakan publik secara umum secara umum kebijakan publik dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

David Easton (Lubis 2007:8), kebijakan pemerintah itu sebagai “kewenangan untuk mengalokasi nilai-nilai” bagi masyarakat secara menyeluruh. selanjutnya Dunn, 2003:22 mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah. dan Anderson (Tangkilisan, dkk 2004:7), menyatakan, bahwa kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya.

Sedangkan implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn ( Wahab, 2002:65), Implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan. selanjutnya Mazmanian dan Sabatier, 1983:3 Mengatakan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak/hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi adalah **“semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan keluaran yang telah digariskan.** Ada dugaan besar, factor yang mempengaruhi kebijakan selain pada aspek implementor juga pada masyarakat di desa sasaran.

Adapun model yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu sebuah model yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn pada tahun 1975 dengan nama *A Model Of The Policy Implementation Process*, Dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang

akan dilaksanakan. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik (Nugroho, 2003:167).

**Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005:99)** mengemukakan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, 6) Sikap para pelaksana.

berkaitan dengan desa tangguh bencana, Saptadi, 2012 mengatakan desa tangguh bencana adalah sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Program Desa Tangguh Bencana mengacu juga pada kerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo (2005:8), yakni mengandung aspek tata kelola; pengkajian risiko; peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan; manajemen risiko dan pengurangan kerentanan; dan aspek kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

Sebagai alur pikir dalam penulisan karya tulis ini yang mengacu dari latar belakang permasalahan mengenai Implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Sigi. Maka peneliti mendasarkan pada pendapat dari **Van Meter dengan Carl Van Horn dalam Subarsono (2005:99)** sebagai landasan teori dalam membuat kerangka pikir. Peneliti sengaja menggunakan teori ini karena dalam teori ini dijelaskan bahwa kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi beberapa variabel yang saling berkaitan dalam hal ini Implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Sigi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian Kualitatif, yang penelitian yang bermaksud memahami dengan jelas fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Subyek penelitian adalah unsur pentahelix penanggulangan bencana, sementara objek penelitiannya adalah implementasi pedoman umum pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Metode pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dengan Van Horn dalam Subarsono (2005:99), yang mencakup aspek standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, dan kondisi sosial, politik dan ekonomi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian kualitatif penulis memilih informan tidak pada besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan peneliti dengan memilih orang-orang yang mengetahui persis seluk beluk permasalahan serta substansi penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi pembaca.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dengan Van Horn dalam Subarsono (2005:99), dimana teorinya beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Secara umum implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Sigi, yang di analisis dari aspek implementasi kebijakan dengan unit analisis, yakni: 1).Standar dan sasaran kebijakan, 2). Sumber daya, 3). Komunikasi antar organisasi, 4). Karakteristik agen pelaksana, 5). Sikap para pelaksana, dan 6).Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Untuk mengetahui tujuan dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan Implementasi Pedoman Umum Pembentukan

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Sigi, informan dalam penelitian ini adalah unsur *pentahelix* Penanggulangan Bencana antara lain: 1). Unsur keterwakilan masyarakat yang tergabung dalam lembaga kebencanaan di desa dan pemerintah Desa Bora Kecamatan Sigi Kota, Desa Jono Kecamatan Dolo Selatan dan Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah; 2), Unsur keterwakilan dari pemerintah Kabupaten Sigi (OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi); 3), Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sigi; 4). Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus pada manajemen bencana di Sulawesi Tengah; 5). Keterwakilan dari akademisi Pusat Studi Mitigasi Bencana Universitas Tadulako dan Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta; 6). Sektor swasta; dan 7). Unsur keterwakilan media.

#### **STANDAR DAN SASARAN KEBIJAKAN**

Indikator tersebut dimaksud yaitu implementasi program DESTANA di masing-masing desa dapat dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada dan merujuk pada komponen-komponen Destana antara lain: (1) Legislasi; (2) Perencanaan; (3) Kelembagaan; (4) Pendanaan; (5) Pengembangan kapasitas dan (6) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Serta selalu menjalankan dengan prinsip penanggulangan bencana (*pentahelix*) sehingga program tersebut dapat diterima dengan jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, standar dan sasaran kebijakan yang menjadi acuan dalam implementasi program desa tangguh bencana di Kabupaten Sigi, telah dilakukan dengan cukup baik walaupun ada beberapa indikator yang belum terpenuhi dalam pengimplementasiannya di tingkat desa karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia yang ada. Selanjutnya keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi dalam melakukan tindaklanjut dari segala kesepakatan dalam dokumen yang telah disusun di tingkat tapak dan kabupaten belum di jalankan dan di tularkan kepada seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Serta upaya membangun ketangguhan yang perlu dilakukan dengan pendekatan kawasan untuk pencapaian semua indikator yang disyaratkan.

#### **SUMBERDAYA**

Indikator tersebut dimaksud yaitu sumberdaya yang mendukung implementasi program DESTANA baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi masih kurang baik dalam mengimplementasikan program ini, baik secara kuantitas maupun kualitas jika dikaitkan dengan pernyataan tiga informan di atas, semua menunjukkan bahwa ketersediaan sumberdaya masih kurang sehingga kekurangan tersebut menjadi perhatian bagi semua pihak untuk mengisi kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten, sehingga pelaksanaan pembentukan desa tangguh bencana dapat terus dilaksanakan dengan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Selanjutnya pendekatan yang dianggap cukup efektif dalam melakukan mitigasi di tingkat tapak yaitu melakukan pendekatan berbasis kearifan lokal, karena peneliti menganggap bahwa sebelum adanya kelembagaan-kelembagaan yang dibentuk di tingkat desa maupun kabupaten, masyarakat sudah lebih dulu melakukan mitigasi bencana dengan optimalisasi sumberdaya yang mereka miliki di desa masing-masing, sehingga masyarakat dalam penanggulangan bencana tidak lagi dianggap sebagai objek tetapi dilihat sebagai subjek, karena jika terjadi bencana merekalah yang terlebih dahulu melakukan aksi-aksi pengurangan risiko bencana sebelum pihak luar datang membantu.

#### **KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI**

Indikator tersebut dimaksud yaitu sebagai hubungan kerjasama yang dibangun antar organisasi lain dalam upaya meningkatkan keberhasilan program DESTANA yang dijalankan. Bukan hanya itu komunikasi juga diperkuat dalam penyaluran informasi pada kelompok sasaran sehingga mereka dapat memahami program yang diimplementasikan tersebut. Berdasarkan

wawancara dengan informan, komunikasi yang dipraktekan sudah baik, hal ini dapat dilihat dengan keberlanjutan program desa tangguh bencana di beberapa wilayah terhusus wilayah Kecamatan Kulawi, serta ruang diskusi yang semakin terbuka bagi para pihak untuk membicarakan terkait issue penanggulangan bencana, serta adanya inisiatif untuk memperkuat kolaborasi melalui *group whatsapp* sehingga update terkait perkembangan situasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Sigi dapat di akses dengan mudah melalui wadah tersebut

#### **KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANA**

Indikator tersebut diartikan sebagai pola pembagian kerja yang jelas agar pelaksana program dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dalam pola pembagian kerja yang jelas sudah dilakukan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi, hanya saja dalam pelaksanaannya, kesiapan sumberdaya manusia menjadi faktor utama sehingga tidak terlaksananya dengan optimal tugas dan tanggung jawab yang telah di didistribusikan dimasing-masing bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2012 tentang tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi. Artinya pola pembagian kerja yang jelas agar pelaksana program dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya masih dirasakan kurang baik

#### **SIKAP PARA PELAKSANA**

Indikator tersebut diartikan sebagai sebuah sikap disiplin kerja para agen pelaksana kebijakan. Artinya apabila implementor memiliki sikap kerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan pasti kebijakan yang dijalankan akan terlaksana dengan baik. Sedangkan jika sikap implementor tidak baik dalam menjalankan kebijakan, maka tentunya tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi masih kurang baik. Hanya beberapa individu saja yang aktif dalam membangun hubungan kerjasama dengan pihak luar secara kolaboratif, seharusnya semua bagian berkontribusi aktif sesuai dengan tupoksinya dalam mewujudkan pembentukan desa tangguh bencana di wilayah Kabupaten Sigi sesuai dengan amanat undang-undang. Jika dikaitkan dengan hasil wawancara di atas, faktor yang mempengaruhi sikap para pelaksana menjadi kurang baik, karena keterbatasan sumberdaya yang memiliki kompetensi dibidangnya menduduki posisi-posisi yang strategis dalam mendukung pembentukan desa tangguh bencana. Hal lain yang mempengaruhi kurang baiknya sikap tersebut yaitu minimnya anggaran peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sigi, dalam melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan kepada seluruh pegawai.

#### **KONDISI SOSIAL, POLITIK dan EKONOMI**

Indikator tersebut diartikan sebagai sebuah dukungan dari masyarakat setempat serta pemangku kepentingan mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijaksanaan desa tangguh bencana. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijaksanaan tersebut, yakni mendukung atau menolak, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijaksanaan. berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kondisi sosial, politik dan ekonomi Kabupaten Sigi dalam pembentukan desa tangguh bencana, telah memberikan perubahan yang baik, artinya respon masyarakat terkait pembentukan desa tangguh bencana sudah baik. Secara sosial dukungan itu diwujudkan dengan partisipatif aktif masyarakat dalam melakukan inisiatif-inisiatif penanggulangan bencana berdasarkan kearifan lokal masing-masing wilayah. Selanjutnya secara politik masyarakat mampu menyusun regulasi di tingkat desa bahkan terlibat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan kabupaten, hal itu menunjukkan bahwa saat ini mereka sadar akan pentingnya regulasi, hubungan politik yang

dibangun secara sehat dan bijak untuk kepentingan bersama dalam rangka penanggulangan bencana serta membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pihak dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kapasitas petani dalam mengelola pertaniannya pasca bencana.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pedoman Umum Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Sigi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Pedoman Umum Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Di Kabupaten Sigi, telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi berkolaborasi dengan mitra yaitu akademisi, masyarakat, *Civil Society Organizing* CSO, media, dan *private sector* yang merupakan bagian dari kerangka kerja *Pentahelix* Penanggulangan Bencana. Hal ini dapat terukur dari hasil penelitian berdasarkan 6 aspek yaitu (1). Standar dan sasaran kebijakan; (2). Sumberdaya; (3). Komunikasi antar organisasi; (4). Karakteristik agen pelaksana; (5). Kecenderungan pelaksana (sikap para pelaksana); dan (6). Kondisi sosial, politik dan ekonomi, yang menunjukkan bahwa implementasi pedoman pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana di Kabupaten Sigi belum terealisasi secara maksimal terutama pada aspek sumberdaya, karakteristik agen pelaksana dan sikap para pelaksana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Teks**

- Agung, I Gusti Ngurah, 1992, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Agustino. 2006., *Implementasi Kebijakan Publik Model van Mater Van Horn: The Policy*
- Anonim. 2005. *Kerangka Aksi Hyogo Pengurangan Risiko Bencana 2005-2015 dalam membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana*. Bakornas PB, Jakarta
- Basrowi, dan Swandi. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2003., *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2006., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Grindle, merilee S., (ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation In The Third World*. New Jersey: *Princetown Univercity Press*
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*, CV.Mandar Maju, Bandung
- Moleong Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh.Ph,D. 2009., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Patilama, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta, Bandung
- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (DisasterManajemen)*. Dian Rakyat, Jakarta
- Sudibyakto, 2011. *Manajemen Bencana di Indonesia ke mana?*. Gadjah Mada university Press, Yogyakarta
- Sugiyono, 2006., *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif R & B*. Alfabeta, Bandung

Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

*Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: Administration and Society*. Sage Publication Inc, Ohio

### **Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi;

Peraturan Bupati Sigi Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kewenangan Desa;

Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Antar Desa Dalam Pengelolaan Sistem Peringatan Dini dan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Tingkat Desa.

### **Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)**

<https://www.ilmuadmpublik.com>

<https://bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/24/peraturan-kepala/2012/perka-1-tahun-2012.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/1199-ID-implementasi-kebijakan-penanggulangan-bencana-suatu-studi-di-badan-penanggulanga.pdf>

<https://www.neliti.com/id/publications/1199/implementasi-kebijakan-penanggulangan-bencana-suatu-studi-di-badan-penanggulangabencana>

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/16703>